BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final atas Penghasilan Honorarium Pegawai Negeri Sipil

2.1.1 Perancangan

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:79) “perancangan sistem adalah proses pengembangan spesifikasi sistem baru berdasarkan hasil rekomendasi analisis sistem”.

Menurut Bin Ladjamudin (2005:39) ”tahapan perancangan (*design*) memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah–masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik.”

Berdasarkan pengertian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud perancangan adalah suatu kegiatan mendesain atau membuat sistem yang baru.

2.1.2 Sistem

Menurut Jogiyanto (2005:2) “sistem Adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Menurut Fathansyah (2002:9):

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

> Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sebuah komponen fungsional (dengan satuan fungsi/tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses/pekerjaan tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah sebuah unsur yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.3 Informasi

Informasi menurut Jogiyanto (2005:8) “informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.”

Menurut Susanto (2007:40) “informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat”.

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Informasi adalah suatu data yang telah diolah sehingga menghasilkan sebuah bentuk yang bermanfaat bagi yang menerimanya.

2.1.4 Sistem Informasi

Menurut Susanto (2007:55):

> Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik phisik maupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Menurut Bin Landjamudin (2005:13) “sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan/atau untuk mengendalikan organisasi”.

Menurut Jogiyanto (2005:11):

> Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang pada saat dilaksanakan saling berhubungan untuk memperoleh informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.5 Akuntansi

Pengertian akuntansi yang penulis ambil adalah akuntansi sektor publik dan akuntansi pajak, Karena penulis melakukan penelitian perusahan milik pemerintah.

Menurut Muljono (2006:1) “akuntansi adalah urutan proses kegiatan p*encatatan, penggolongan, peringkasan* dan *penyajian* dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.”

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Menurut Halim (2002:28):

> Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan pengertian akuntansi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan penyajian transaksi keuangan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan.

2.1.5.1 Metode Pencatatan Akuntansi

Menurut Halim (2002:40):

> Basis kas (*cash basis*) merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan parubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

Menurut Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Daerah Dalam Negeri (2007:16) “akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang paling sederhana, yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan apabila menimbulkan perubahan pada kas.

Menurut Halim (2002:41):

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

> Basis Akrual (*Acrual Basic*) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

Menurut Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Daerah Dalam Negeri (2007:17) "akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mencatat dan mengakui transaksi pada saat terjadi bukan hanya terjadi pada saat berpengaruh pada kas.

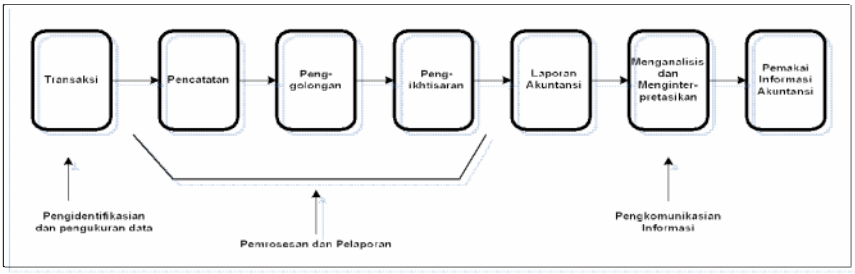
2.1.5.2 Proses Akuntansi

Menurut Soemarso (2004: 20):

> Proses akuntansi merupakan suatu kegiatan yang meliputi pengidentifikasian dan pengukuran data relavan untuk pengambilan keputusan, pemrosesan data, dan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan, pengkomunikasian informasi kepada pemakai.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Seperti dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Proses Akuntansi (Soemarso, 2004:20)

2.1.5.3 Siklus Akuntansi

Menurut Bastian (2007:76) “siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan.”

Menurut Halim (2002:43) “siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi.”

Tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi tersebut adalah:

A. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
B. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal.
C. Meringkas, dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut *posting* atau mengakunkan.
D. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkannya dalam neraca saldo.
E. Menyesuaikan buku besar berdasarkan informasiyang paling *up-to-date* (mutakhir)

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

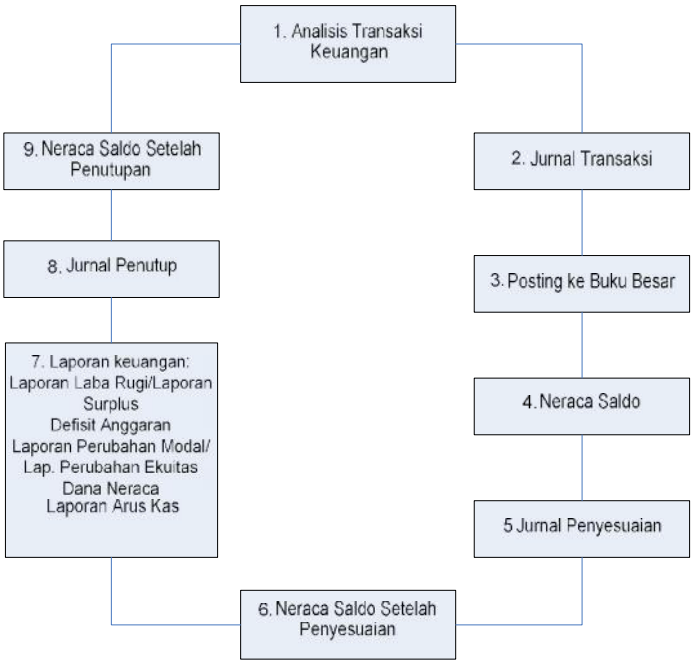
F. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP)

G. Menentukan laporan keuangan berdasarkan NSSP

H. Menutup buku besar

I. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku.

Apabila digambarkan, siklus akuntansi akan berbentuk sebagai berikut:



Gambar 2.2 Siklus Akuntansi (Halim, 2002:43)

Berdasarkan pengertian di atas siklus akuntansi adalah suatu sistematika pencatatan traksaksi keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan yang terdapat dalam tahap-tahap sistem akuntansi.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

2.1.5.3.1 Jurnal Umum

Menurut Muljono (2006:18) “jurnal adalah catatan asli (*original entry*) dari transaksi keuangan perusahaan, yang menunjukan perkiraan apa yang harus didebit dan perkiraan apa yang harus dikredit serta jumlahnya”.

Menurut Halim (2004:45) “jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi”.

Menurut Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Daerah Dalam Negeri (2007:9) “menjurnal adalah prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis (berdasarkan urutan waktu terjadi transaksi).”

Berdasarkan kedua definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jurnal adalah suatu media untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan secara kronologis.

Tabel 2.1 Jurnal Umum

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Jurnal Umum
Periode, xxx

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	
				Debit	Kredit

(Bastian, 2007:86)

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Tabel 2.2 Jurnal Umum pada saat Penerimaan SP2D

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Jurnal Umum
Periode, xxx

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	
				Debit	Kredit
	xxx	Kas di Bank	1.1.1.04.01	xxx	-
		Pajak Penghasilan pasal 21	7.1.1.4.1	xxx	-
		Kas Daerah	1.1.1.01.01	-	xxx
		(Penerimaan SP2D.....atas ....)			

(Bastian, 2007:86)

Jurnal umum di atas dicatat pada saat penerimaan SP2D dari BUD, rekening kas di bank berada di sebelah debet yang berarti bahwa diterima sejumlah uang yang berasal dari kas daerah yang masuk ke kas di bank. Pajak sudah langsung dipotong oleh BUD. Kas daerah berada di sebelah kredit yang berarti keluarnya uang berdasarkan SP2D dari kas daerah.

Tabel 2.3 Jurnal Umum pada saat Pencairan Dana

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Jurnal Umum
Periode, xxx

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	
				Debit	Kredit
	xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.03.01	xxx	-
		Kas di Bank	1.1.1.04.01	-	xxx
		(Bayar ....)			

(Bastian, 2007:86)

Jurnal di atas dicatat pada saat melakukan pencairan dana dari kas yang berada di bank. Kas di bendahara pengeluaran berada di debet berarti bertambahnya kas bendahara pengeluaran, sedangkan kas di bank berada di sebelah kredit berarti berkurangnya sejumlah uang yang ada di kas bank.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Tabel 2.4 Jurnal Umum pada saat Pengakuan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Jurnal Umum Periode, xxx					
Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	
				Debit	Kredit
	xxx	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Utang Jangka Pendek lainnya	5.1.1.02.05 2.1.6.01.01	xxx -	- xxx

(Bastian, 2007:86)

Jurnal di atas mencatat pengakuan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. Utang jangka pendek lainnya berada di sebelah kredit, berarti bertambahnya utang atas tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

Tabel 2.5 Jurnal Umum pada saat Pelunasan Utang Jangka Pendek lainnya

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Jurnal Umum Periode, xxx					
Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	
				Debit	Kredit
	xxx	Utang Jangka Pendek lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran	2.1.6.01.01 1.1.1.03.01	xxx -	- xxx

(Bastian, 2007:86)

Jurnal di atas dicatat pada saat dilakukan pelunasan utang jangka pendek lainnya dari kas di bendahara pengeluaran. Rekening kas di bendahara pengeluaran berada di sebelah kredit berarti telah berkurang kas di bendahara pengeluaran sejumlah uang yang dikeluarkan.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

2.1.5.3.2 Buku Besar Umum

Menurut Muljono (2006:20) “buku besar adalah buku catatan akhir (*books on final entry*) yang merupakan kumpulan rekening neraca (riil) dan rekening-rekening rugi laba (nominal).”

Menurut Halim (2004:49) “buku besar merupakan suatu buku yang yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal.”

Menurut Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Daerah Dalam Negeri dalam (2007:10) “buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan (*account*).”

Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa buku besar adalah buku yang berisi tentang kumpulan rekening yang dicatat dalam jurnal.

Tabel 2.6 Buku Besar Umum

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Satuan Kerja:.....
Buku Besar Umum

Nama Rekening :
Kode Rekening : Hal. ....

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo

(Halim, 2004:50)

Tabel 2.7 Buku Besar Umum untuk Kas di Daerah

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Satuan Kerja: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Buku Besar Umum

Nama Rekening : 1.1.1.01.01
Kode Rekening : Kas di Kas Daerah Hal. ....

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo
xxx	Kas di Bank	1.1.1.04.01	-	xxx	xxx
	Pajak Penghasilan Pasal 21	7.1.1.4.1	-	xxx	xxx

(Halim, 2004:50)

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Tabel 2.8 Buku Besar Umum untuk Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Satuan Kerja: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Buku Besar Umum

Nama Rekening : 7.1.1.4.1
Kode Rekening : Pajak Penghasilan Pasal 21 Hal. ....

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo
xxx	Kas di Daerah	1.1.1.01.01	xxx	-	xxx

(Halim, 2004:50)

Tabel 2.9 Buku Besar Umum untuk
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Satuan Kerja: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Buku Besar Umum

Nama Rekening : 5.1.1.02.05
Kode Rekening : Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Hal. ....

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo
xxx	Utang Jangka Pendek lainnya	2.1.6.01.01	xxx	-	xxx

(Halim, 2004:50)

Tabel 2.10 Buku Besar Umum untuk Kas di Bendahara Pengeluaran

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Satuan Kerja: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Buku Besar Umum

Nama Rekening : 1.1.1.03.01
Kode Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran Hal. ....

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo
xxx	Kas di Daerah	1.1.1.01.01	xxx	-	xxx
	Utang Jangka Pendek lainnya	2.1.6.01.01	-	xxx	xxx

(Halim, 2004:50)

Tabel 2.11 Buku Besar Umum untuk Utang Jangka Pendek lainnya

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Satuan Kerja: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Buku Besar Umum

Nama Rekening : 2.1.6.01.01
Kode Rekening : Utang Jangka Pendek lainnya Hal. ....

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo
xxx	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	5.1.1.02.05	-	xxx	xxx
	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.03.01	xxx	-	xxx

(Halim, 2004:50)

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

2.1.5.3.3 Neraca Saldo

Menurut Halim (2002:52) “neraca saldo adalah daftar rekening beserta saldo yang menyertainya.”

Menurut Alimansyah dan Padji (2002:237) “neraca saldo atau neraca sisa (*trial balance*): daftar saldo perkiraan-perkiraan yang ada dalam perusahaan pada suatu saat tertentu.”

Tabel 2.12 Neraca Saldo

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Neraca Saldo Periode, xxx			
No. Rekening	Nama Rekening	Saldo	
		Debit	Kredit
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	xxx	-
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	-
1.1.1.04.01	Kas di Bank	xxx	-
2.1.6.01.01	Utang Jangka Pendek lainnya	-	xxx
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	xxx	-
7.1.1.4.1	Pajak Penghasilan Pasal 21	xxx	-

(Halim, 2004:53)

2.1.5.3.4 Laporan Keuangan

Menurut Alimansyah dan Padji (2002:225) “laporan keuangan (*financial statement*): laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Pengertian laporan keuangan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 (dalam Nordiawan, dkk, 2007:151) “laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Pengertian arus kas menurut Halim (2004:64):

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Laporan aliran/arus kas adalah laporan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam satu periode.

Menurut Bastian (2007:380) "laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi".

Tabel 2.13 Laporan Arus Kas

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Laporan Arus Kas
Period,xxx

SKPD : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kode Organisasi : 1.20.05

Uraian	Jumlah
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Masuk Kas	
Kas Daerah	xxx
Jumlah arus masuk kas	xxx
Arus Keluar Kas	
Belanja Pegawai	xxx
Jumlah arus Keluar Kas	xxx
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	xxx
Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan	
Arus masuk kas	
Jumlah arus masuk kas	-
Arus keluar kas	
Jumlah arus keluar kas	-
Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuangan	-
Arus kas dari aktivitas pembiayaan	
Arus kas masuk	
Jumlah arus masuk kas	-
Arus keluar kas	
Jumlah arus keluar kas	-
Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	-
Arus kas dari aktivitas nonanggaran	
Arus masuk kas	
Penerimaan Perhitungan Pihak ke tiga	
- Pajak Penghasilan Pasal 21	xxx
Jumlah arus masuk kas	xxx
Arus keluar kas	
Pengeluaran Perhitungan Pihak ke tiga	
- Pajak Penghasilan Pasal 21	xxx
Jumlah keluar kas	xxx
Arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran	xxx
kenaikan/penurunan kas	xxx
saldo awal kas	xxx
saldo akhir kas	xxx

(Bastian, 2007:519)

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

2.1.5.4 Sistem Pencatatan Akuntansi

A. *Single Entry*

Menurut Halim (2002: 36) “sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali”.

B. *Double Entry*

Menurut Halim (2002:37-38) “sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal”.

Persamaan Dasar:

AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN				
AKTIVA	BELANJA	UTANG	EKUITAS DANA	PENDAPATAN
D K	D K	D K	D K	D K
+ -	+ -	- +	- +	- +

C. *Triple Entry*

Menurut Halim (2002:39) “sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran”.

2.1.5.5 Belanja Daerah

Belanja daerah berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2006 “belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

2.1.5.5.1 Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

Pengertian belanja langsung berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2006 "…..merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja langsung menurut jenis belanjanya terdiri dari:

A. Belanja pegawai
B. Belanja barang dan jasa
C. Belanja modal

Belanja pegawai berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2006 "….untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah".

2.1.5.5.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Belanja tidak langsung berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2006 "….merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan".

Belanja pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2006 "….merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2006:

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
(3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

2.1.5.6 Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pengelolaan kas non anggaran menurut Bastian (2007:113) “pengelolaan kas non anggaran adalah pengelolaan atas uang yang diwajibkan untuk dipungut oleh pemerintah kota sebagai wajib pungut”.

Berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2006:

(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah”.
(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
    a. Potongan Taspen;
    b. Potongan Askes;
    c. Potongan PPh;
    d. Potongan PPN
    e. Penerimaan titipan uang muka;
    f. Penerimaan uang jaminan; dan
    g. Penerimaan lainnya yang sejenis
(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
    a. Potongan Taspen;
    b. Potongan Askes;
    c. Potongan PPh;

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

d. Potongan PPN
e. Penerimaan titipan uang muka;
f. Penerimaan uang jaminan; dan
g. Penerimaan lainnya yang sejenis

(4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga.
(5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga.
(6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.

Pengertian perhitungan pihak ketiga menurut Nur Afiah (2009:xxviii) "perhitungan pihak ketiga adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti PPh, PPN, iuran Askes, Taspen dan Taperum".

Berdasarkan pengertian di atas, pengelolaan kas non anggaran adalah pengelolaan atas kas yang tidak mempengaruhi anggaran, pendapatan, belanja dan pembiyaan pemeritah daerah yang pencatatannya diperlakukan sebagai perhitungan fihak ketiga.

2.1.6 Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2001:3) "sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan."

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Menurut Alimansyah dan Padji (2003:284**)** "sistem Akuntansi adalah suatu cabang dari akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan dan pelaporan data keuangan".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah sebuah cabang dari akuntansi yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah informasi mengenai keuangan.

2.1.7 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Krismiaji (2002:4) "sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis".

Menurut Susanto (2007:124):

> SIA dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi infomasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilaan keputusan dibidang keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses dan mengolah data transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat yang digunakan sebagai pengambilan keputusan.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

2.1.8 Pajak

Menurut Alimansyah dan Padji (2003:243):

> Pajak (*tax*): iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undangan (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum berkenaan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan, dan pembangunan negara, kemakmuran bangsa, kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan id.wikipedia.org "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang - sehingga dapat dipaksakan - dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung".

Berdasarkan pengertian di atas penulis menarik kesimpulan, bahwa pajak adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada rakyat berdasarkan undang-undang.

2.1.8.1 PPh Pasal 21 Final

Menurut Tansuria (2011:1):

> Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atau rampung adalah PPh dengan perlakuan tersendiri dimana penggunaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan ke kas Negara.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2010:46.4):

> Pajak penghasilan yang bersifat final yaitu, bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.

Berdasarkan PSAK no. 46 (dalam Waluyo, 2008:194):

> Pajak penghasilan yang bersifat final yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis pajak penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

2.1.8.2 Wajib Pajak

Berdasarkan www.pajak.go.id:

> Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Alimansyah dan Padji (2003:298) “wajib Pajak (*tax payer*) : orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan”.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang ditentukan oleh perungan-undangan diwajibkan untuk membayar pajak.

2.1.8.3 Objek Pemotongan

Berdasarkan pasal 2 ayat (1), 636/KMK.04/1994 (dalam Waluyo, 2009:94):

> Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji, uang pension dan tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau uang pension, yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan pensiunan.

Berdasarkan pasal 1, PP Nomor 149 Tahun 2000 (dalam Waluyo:2009:92):

> Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tembusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tuan, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2.1.8.4 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Berdasarkan www.pajak.go.id “nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Menurut Alimansyah dan Padji (2003:240) “nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP (*tax payer identification number*): nomor yang diberikan oleh kantor inspeksi pajak kepada orang atau badan pada saat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat mengambil kesimpulan bahwa NPWP adalah sebuah nomor pokok wajib pajak uang digunakan sebagai tanda pengenal bahwa orang atau badan telah terdaftar sebagai wajib pajak.

2.1.8.5 Pemotong PPh Pasal 21 Final

Menurut Resmi (2008:155) “pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh Pasal 21”.

Pemotong PPh pasal 21 final atas penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada keuangan Negara/Daerah menurut waluyo yaitu,

Menurut Waluyo (2009:94):

> Bendaharawan pemerintah, Pemegang Kas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero Taspen) dan Asuransi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Pemotong PPh Pasal 21 Final atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tembusan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, Menurut Waluyo (2009:92) “pihak-pihak yang

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

membayarkan Uang Pesangon, Uang Tembusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua".

Berdasarkan pengertian di atas, pemotong PPh Pasal 21 yaitu setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

2.1.8.6 Tarif Pemotongan Pajak

Tarif pemotongan yang ditetapkan atas penghasilan honorarium pegawai negeri sipil, berdasarkan pasal 2 ayat (1), 636/KMK.04/1994 (dalam Waluyo, 2009:94) "sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto penghasilan".

Tarif pemotongan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 pasal 4 ayat (2):

a. Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
b. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama dan Pensiunannya;
c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi dan Pensiunannya.

2.1.8.7 Pengecualian Pemotongan

Pengecualian pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 final atas penghasilan honorarium pegawai negeri sipil berdasarkan pasal 2 ayat (1), 636/KMK.04/1994 (dalam Waluyo, 2009:94) "penghasilan yang dibayarkan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah".

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pengecualian pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 final yaitu penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dengan golongan II/d ke bawah AKABRI dengan pangkat pembantu letnan satu ke bawah.

2.1.9 SIA Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final

Sistem informasi akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 final merupakan suatu pengikhtisaran, penghitungan dan pemotongan pajak atas dasar penghasilan pejabat negara, pegawai negeri sipil yang berupa honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada keuangan Negara/Daerah.

2.1.10 Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut Waluyo (2009:176) "penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak atas seluruh penghasilannya."

Pengertian penghasilan berdasarkan Kamus Istilah menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998 (1999:418):

> Semua imbalan atau pembayaran dari pekerjaan dalam hubungan kerja yang dapat berupa upah, gaji, dan sebagainya, termasuk premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja. (penjelasan UU 7/1991 Ps.4(1)a.: TLN 1991/3459).

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah perolehan atau kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban.

2.1.11 Honorarium

Pengertian honorarium menurut Ardiyos (hal. 487) “upah atau pembayaran yang diberikan pada seseorang sebagai imbalan dari jasa-jasa yang diberikan.”

Berdasarkan http://www.kppn-jktsatu.web.id “honorarium adalah pembayaran atas jasa ang diberikan pada suatu kegiatan tertentu”.

Berdasarkan pengertian di atas honorarium yaitu pembayaran atas jasa yang diberikan berdasarkan suatu kegiatan.

2.1.12 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pengertian pegawai negeri menurut UURI no 43 tahun 1999:

> Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia ang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai negeri terdiri dari:

A. Pegawai Negeri Sipil

B. Anggota Tentara Nasional Indonesia

C. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

2.1.13 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final atas Penghasilan Honorarium Pegawai Negeri Sipil

2.1.13.1 Definisi PSIA Pemotongan PPh Pasal 21 Final atas Penghasilan Honorarium PNS

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perancangan sistem informasi akuntansi pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 final atas penghasilan honorarium pegawai negeri sipil adalah merancang dan mendesain suatu sistem baru mengenai informasi penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 final yang dipotong atas penghasilan honorarium yang diterima pegawai negeri sipil.

2.1.13.2 Fungsi Yang Terkait

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007:84):

Fungsi Yang Terkait
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
b. Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran
c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
e. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

2.1.13.3 Dokumen yang Digunakan

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007:84):

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Dokumen Yang Digunakan
a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)
b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS)
c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
d. Nota Debet Bank

2.1.13.4 Catatan yang Digunakan

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007:85):

Catatan Yang Digunakan
a. Buku Jurnal Pengeluaran Kas
b. Buku Besar
c. Buku Besar Pembantu

Menurut Muljono (2006:17):

Formulir merupakan unsur pokok dalam sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk mencatat suatu transaksi pada saat terjadinya sehingga menjadi bukti tertulis dari transaksi yang terjadi seperti:
a. Surat Setoran Pajak
b. Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak.

2.1.13.5 Kebutuhan Rekayasa *Software* SIA Pemotongan PPh Pasal 21 Final atas Penghasilan Honorarium Pegawai Negeri Sipil

Pengertian *software* menurut Susanto (2007:166) “kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer”.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Software aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat perancangan sistem informasi pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 final atas penghasilan honorarium pegawai negeri sipil, yaitu sebagai berikut:

A. PHP Triad

B. Visual Basic 6.0

C. Visual Basic.Net

D. Dephi

E. Turbo C++

Software aplikasi yang penulis gunakan dalam membuat perancangan sistem informasi pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 final atas penghasilan honorarium pegawai negeri sipil adalah Microsoft Visual Basic 6.0, karena *software* ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang cukup populer dan mudah di pelajari. *Software* ini akan menghasilkan program aplikasi tentang sistem informasi pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 final atas penghasilan honorarium pegawai negeri sipil.

Pembuatan *software* aplikasi ini juga membutuhkan *database* sebagai tempat penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Menurut Riyanto (2005:2) "*database* merupakan kumpulan dari beberapa data dalam jumlah yang banyak, saling berhubungan, dan mempunyai arti tertentu."

Ada beberapa macam *database* yang bisa digunakan untuk membuat perancangan sistem informasi pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 final atas penghasilan honorarium pegawai negeri sipil, yaitu:

A. SQL Server 2000

B. SQL Server 2005

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

C. Oracle

D. Microsoft Access

E. PHP MySQL

Penulis dalam membuat perancangan sistem infomasi peomotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 final atas penghasilan honorarium pegawai negeri sipil menggunakan *database* SQL Server, karena merupakan produk andalan dari *Microsoft* untuk *database* server. SQL Server juga mendukung penggunaan bahasa SQL (*Structure Query Language*), SQL Server juga mempunyai kemampuan untuk akses *client server*.

Selain menggunakan *Software* aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000 sebagai *database*, penulis juga menggunakan Report untuk hasil *output*. Penulis menggunakan *software crystal report* dalam pembuatan laporan perancangan sistem informasi pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 final atas penghasilan honorarium pegawai negeri sipil**.**

2.2 Bentuk, Jenis dan Bidang Perusahaan

Bentuk perusahaan yang penulis teliti merupakan Dinas Pemerintahan Daerah. Pengertian Dinas Daerah menurut http://pusatbahasa.diknas.go.id “satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yg berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.”

Jenis perusahaannya merupakan perusahaan jasa. Pengertian perusahaan jasa menurut http://pusatbahasa.diknas.go.id “perusahaan yg produk usahanya berupa jasa (bukan barang).”

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Perusahaan yang penulis teliti, yaitu bergerak dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya daerah Cilegon.

2.3 Alat Pengembangan Sistem

2.3.1 Diagram Konteks

Menurut Bin Ladjamudin (2005:64) “diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem”.

Menurut Sutabri (2004:166):

> Diagram konteks dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses atau dengan kata lain diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan sistem secara umum atau global dari keseluruhan sistem yang ada.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses yang menggambarkan sistem secara umum atau global dari keseluruhan sistem yang ada.

2.3.2 Diagram Arus Data (*Data flow Diagram*/DFD)

Menurut Bin Ladjamudin (2005:64) “diagram aliran data merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil”.

Menurut Krismiaji (2002:68) “sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi”.

Berdasarkan pengertian di atas DFD merupakan sebuah gambar yang menjelaskan tentang alur suatu proses.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Langkah-langkah dalam membuat *data flow diagram* (DFD) dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

Menurut Sutabri (2004:166):

a. Diagram Konteks
   Diagram ini dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses atau dengan kata lain diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan sistem secara umum/global dari keseluruhan sistem yang ada.
b. Diagram Nol (0)
   diagram ini dibuat untuk menggambarkan tahapan proses yang ada di dalam diagram konteks, yang penjabarannya lebih terperinci.
c. *Data Flow Diagram Detail*
   Diagram ini dibuat untuk menggambarkan arus data secara lebih mendetail lagi dari tahapan proses yang ada di dalam diagram.

2.3.3 Kamus Data

Menurut Jogiyanto (2005:725) “kamus data (KD) atau *data dictionary* (DD) atau disebut juga dengan istilah *systems data dictionary* adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi.

Menurut Bin Landjamudin (2005:70) “kamus data sering disebut juga dengan sistem data *dictionary* adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kamus data adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi.

Isi dari kamus data yaitu terdiri dari:

A. Nama Arus Data

B. Alias

C. Bentuk Data

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

D. Arus Data

E. Penjelasan

2.3.4 Bagan Alir (*Flowchart*)

Menurut Krismiaji (2002:71):

> Bagan Alir (*Flowchart*) merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir merupakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem.

Menurut Jogiyanto (2005:795) “bagan alir (*Flowchart*) adalah bagan (*Chart*) yang menunjukan alir (*Flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika”.

Berdasarkan pengertian di atas pengertian bagan alir (*Flowchart*) adalah suatu bagan yang berbentuk simbol yang digunakan untuk menunjukan sebuah alur prosedur dalam suatu sistem.

Lima macam bagan alir, yaitu:

A. Bagan Alir Sistem (*System Flowchart*)

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:81) “bagan alir sistem (*System Flowchart*) merupakan bagan yang menunjukan arus pekerjaan dari sistem secara keseluruhan, menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem serta menunjukan apa yang dikerjakan di dalam sistem”.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Menurut Jogiyanto (2005:796) “bagan alir sistem (*systems flowchart*) merupakan bagan yang menunjukan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem”.

Berdasarkan pengertian di atas bagan alir sistem yaitu sutau bagan yang menunjukan arus dari suatu sistem keseluruhan yang menjelaskan prosedur-prosedur alur tersebut.

B. Bagan Alir Dokumen (*Document Flowchart*)

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:83) “bagan alir dokumen adalah bagan alir yang menunjukan arus laporan dan formulir, termasuk tembusan-tembusannya, menggunakan simbol-simbol yang sama dengan bagan alir sistem”.

Menurut Jogiyanto (2005:800) “bagan alir dokumen (*Document Flowchart*) atau disebut juga bagan alir formulir atau *paperwork flowchart* merupakan bagan alir yang menunjukan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bagan alir dokumen yaitu bagan alir yang menunjukan suatu alur dari dokumen.

C. Bagan Alir Skematik (*Schematic Flowchart*)

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:83) “bagan alir skematik menggambarkan prosedur di dalam sistem, merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem”.

Menurut Jogiyanto (2005:802) “bagan alir skematik (*schematic flowchart*) merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem”.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Berdasarkan penjelasan di atas, bagan alir skematik yaitu suatu bagan alir yang mirip degan bagan alir sistem yang menggambarkan suatu prosedur yang ada di dalam sistem.

D. Bagan Alir Program (*Program Flowchart*)

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:83) “bagan alir program merupakan bagan alir yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah proses program, dibuat dari derivikasi bagan alir sistem”.

Menurut Jogiyanto (2005:802) “bagan alir program (*program flowchart*) merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program”.

Berdasarkan pengertian di atas bagan alir program, yaitu suatu bagan alir yang menjelaskan tentang alur suatu program.

E. Bagan Alir Proses

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:84) “bagan alir proses merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri, berguna bagi analis sistem untuk menggambarkan proses yang ada di dalam suatu perosedur”.

Menurut Jogiyanto (2005:805) “bagan alir proses (*proses flowchart*) merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Bagan alir ini juga bergunak bagi analis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur”.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

2.3.5 Normalisasi

Menurut Bin Ladjamudin (2005:169) “normalisasi adalah suatu proses memperbaiki/membangun dengan model data relasional, dan secara umum lebih cepat dikoneksikan dengan model data logika”.

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:98) “normaslisasi merupakan sebuah teknik dalam desain logika sebuah database, teknik pengelompokan atribut dari suatu relasi sehingga memberikan struktur relasi yang baik (tanpa redudansi)”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka normalisasi adalah sebuah teknik membangun dengan model relasional sehingga memberikan struktur yang baik.

Beberapa langkah-langkah dalam pembentukan normalisasi, yaitu:

A. Bentuk Tidak Normal (*Unnormalized Form*)

Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti format tertentu, dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan saat menginput.

B. Bentuk Normal Kesatu (*First Normal Form*/1 NF)

Pada tahap ini dilakukan penghilangan beberapa group elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi diantara setiap baris pada suatu tabel, dan setiap atribut harus mempunyai nilai data yang *atomic* (bersifat *atomic value*). Atom adalah zat terkecil yang masih memiliki sifat induknya, bila dipecah lagi maka ia tidak memiliki sifat induknya.

Syarat normal ke satu (1-NF):

1. Setiap data dibentuk dalam *flat file*, data dibentuk dalam satu *record* demi satu *record* nilai dari *field* berupa *atomic value*.
2. Tida ada *set atribute* yang berulang atau bernilai ganda

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

3. Telah dibentuknya *primary key* untuk label/relasi tersebut.
4. Tiap atibut hanya memiliki satu pengertian.

C. Bentuk Normal Kedua (*Second Normal Form*/2 NF)

Bentuk normal kedua didasari atas konep *full functional dependency* (ketergantungan fungsional sepenuhnya). Bentuk normal kedua memungkinkan suatu relasi memiliki *composite key*, yaitu relasi dengan *primary key* yang terdiri dari dua atau lebih atribut.

Syarat normal kedua (2-NF):

1. Bentuk data telah memenuhi kriteria utnuk normal kesatu
2. *Atribute* bukan kunci (*non-key*) haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya (*full functional dependency*) pada kunci utama/*primary key*.

D. Bentuk Normal Ketiga

Walaupun relasi 2-NF memiliki redudansi yang lebih sedikit dari pada relasi 1-NF, namun relasi tersebut masih mungkin mengalami kendala bila terjadi anomaly peremajaan (*update*) terhadap relasi tersebut.

Syarat normal ketiga (*Third Normal Form*/3 NF)

1. Bentuk data telah memenuhi kriteria normal kedua
2. *Atribute* bukan kunci (*non-key*) haruslah tidak memiliki ketergantungan trasnsistif, dengan kata lain suatu atribut bukan kunci (*non-key*) tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional (*functional dependency*) terhadap atribut bukan kunci lainnya, seluruh atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap *primary key* di relasi itu saja.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

E. *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF)

Boyce-Codd Normal Form (BCNF) didasari pada ketergantungan fungsional (*functional dependencies*) dalam suatu relasi yang melibatkan seluruh *candidate key* di dalam relasi tersebut. Jika suatu relasi hanya memiliki satu *candidate key*, maka hasil uji normalisasi sampai ke bentuk normal ketiga dengan *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF).

Suatu relasi dikatakan telah memenuhi kriteria *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF), jika dan hanya jika setiap determinan adalah suatu *candidate key*.

2.3.6 Diagram Relasi Entitas (*Entity Relationship Diagram/ERD*)

Menurut Bin Ladjamudin (2005:142) “ERD merupakan model jaringan data yang menekankan pada struktur-struktur dan relationship data”.

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:99) “ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antar penyimpanan”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimulan, yaitu *Entity Relationship Diagram* adalah sebuah model jaringan data yang menekankan pada hubungan antar penyimpanan.

A. Derajat Relationship (*Relationship Degree*)

Menurut Bin ladjamudin (2005:144) “*relationship Degree* atau Derajat *Relationship* adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam satu *relationship*”.

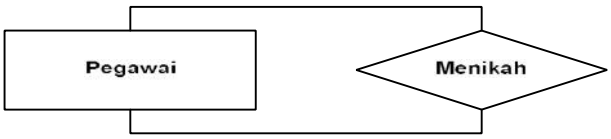
Derajat *relationship* yang sering dipakai di dalam ERD adalah sebagai berikut:

1. *Unary Relationship*

Unary Relationship adalah model relationship yang terjadi diantara *entity* yang berasal dari *entity* set yang sama.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Contoh:



Gambar 2.3 Diagram *Relationship Unary* (Bin Landjamudin, 2005:145)

2. *Binary Relationship*

   Binary Relationship adalah model *relationship* antara *instance-instance* dari suatu tipe entitas (dua entity yang berasal dari entity yang sama).

   Contoh:

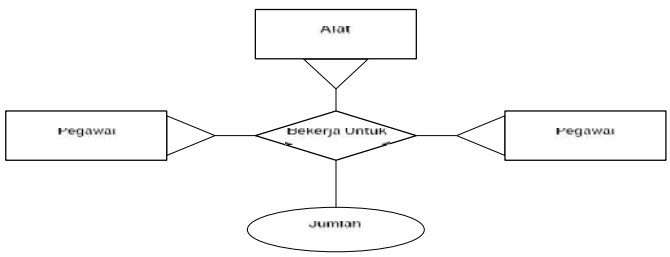


Gambar 2.4 Diagram *Relationship Binary* (Bin Landjamudin, 2005:145)

3. *Ternary Relationship*

   Ternary Relationship merupakan *relationship* antara *instance-instance* dari tiga tipe entitas secara sepihak.

   Contoh:



Gambar 2.5 Diagram *Relationship Ternary* (Bin Ladjamudin, 2005:146)

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

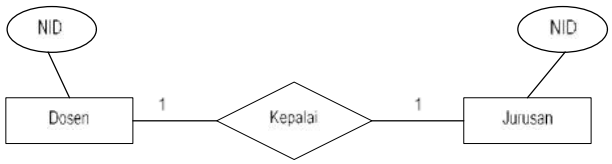
B. Kardinalitas Relasi

Terdapat 3 macam kardinalitas relasi, yaitu sebagai berikut:

1. *One to One*

Tingkat hubungan ini menunjukkan hubungan satu ke satu, dinyatakan dengan satu kejadian pada entitas pertama, dan hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang kedua dan sebaliknya.

Contoh:

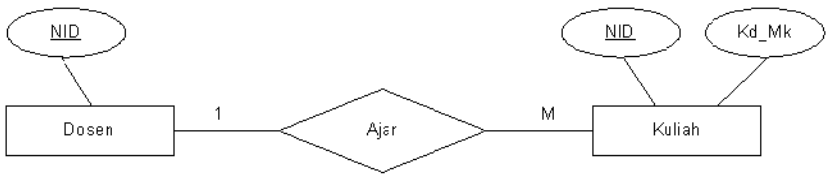


Gambar 2.6 Diagram kardinalitas *One to One* (Bin Ladjamudin, 2005:149)

2. *One to Many* atau *Many to One*

Tingkat hubungan satu ke banyak adalah sama dengan banyak ke satu, tergantung dari arah mana hubungan tersebut dilihat. Untuk satu kejadian pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas yang kedua. Sebaliknya, satu kejadian pada entitas yang kedua hanya dapat mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang pertama.

Contoh:



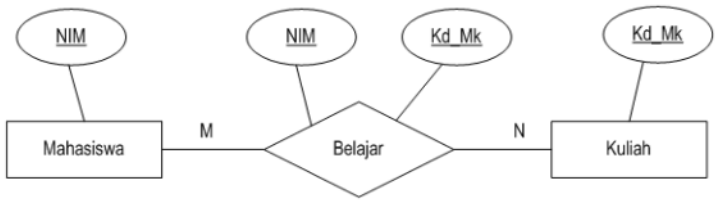
Gambar 2.7 Diagram kardinalitas *One to Many* (Bin Landjamudin, 2005:150)

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

3. Relasi Banyak-ke-Banyak *(Many to Many)*

   Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi jika tiap kejadian pada sebuah entitas akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya, dilihat dari sisi entitas yang pertama maupun dilihat dari sisi yang kedua.

   Contoh :



Gambar 2.8 Diagram kardinalitas *Many to Many* (Bin Ladjamudin, 2005:151)

Key menurut Bin ladjamudin (2005:138) “elemen *record* yang dipakai untuk menemukan *record* tersebut pada waktu akses, atau bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi setiap *entity/record*/baris”.

Jenis-jenis *key* sebagai berikut:

a. *Superkey*

   Superkey merupakan satu atau lebih atribut (kumpulan atribut) dari suatu tabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi entity/record dari tabel tersebut secara unik.

b. *Candidate Key*

   Superkey dengan jumlah atribut minimal, disebut dengan *candidate key*. *Candidate key* tidak boleh berisi atribut dari tabel yang lain, sehingga *candidate key* sudah pasti *superkey* namun belum tentu sebaliknya.

   Contoh:

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

CANDIDATE KEY

NIM	NAMA	NO.KWITANSI	JUMLAH
99555011000	HARUN	637	50000
99555011030	BAHAR	412	60000
99555021100	MARDI	910	85000
99555021061	MARNO	252	45000

Gambar 2.9 *Candidate Key* (Bin Ladjamudin, 2005:139)

c. *Primary Key*

Salah satu dari *candidate key* dapat dipilih/ditentukan menjadi *primary key*.

Contoh:

PRIMARY KEY

NIM	NAMA	UMUR
98663100010	KHOLOD	22
98663100012	YANI	27
98663100029	RAHMAN	25
98663100208	FATHONI	20
98663100576	KARNO	28

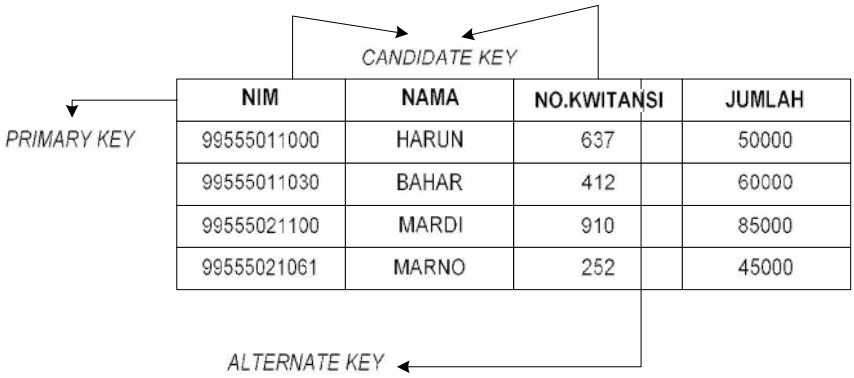
Gambar 2.10 *Primary Key* (Bin Landjamudin, 2005:140)

d. *Alternate Key*

Setiap atribut dari *candidate key* yang tidak terpilih menjadi *primary key*, maka atribut-atribut tersebutdinamakan *alternate key*.

Contoh:

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

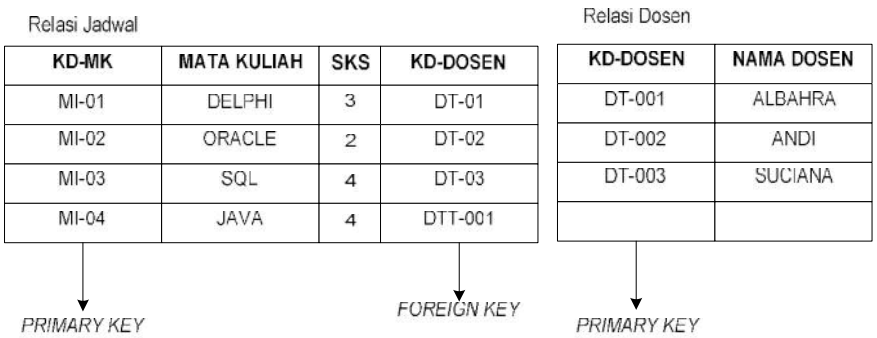


Gambar 2.11 *Alternate Key* **(**Bin Ladjamudin, 2005:140)

e. *Foreign Key*

Foreign key merupakan sembarang atribut yang menunjuk kepada primary key pada tabel yang lain. *Foreign key* akan menjadi pada suatu relasi yang memiliki kardinalitas one to many (satu ke banyak) atau many to many (banyak ke banyak).

Contoh:



Gambar 2.12 *Foreign Key* (Bin Landjamudin, 2005:141)

2.4 *Software*

Perangkat lunak (*Software*) komponen data *processing* yang berupa program-program dan teknik-teknik lainnya untuk mengontrol sistem komputer.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Software dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu:

A. Perangkat lunak sistem operasi (*Operating system*)

B. Perangkat lunak bahasa (*Language software*)

C. Perangkat lunak aplikasi (*Application software*)

Pengertian *Software* menurut Syafrizal (2007: 22) "perangkat lunak berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada *system computer*".

Menurut Susanto (2007:166) "*software* adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer".

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *software* adalah sebuah perangkat lunak yang terdiri dari kumpulan program-program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer.

2.4.1 *Operating System Software*

Menurut Syafrizal (2007:22) "*operating system software* merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengkonfigurasi komputer agar dapat menerima berbagai perintah dasar yang diberikan sebagai masukan".

Menurut Razaq dan Ruly (2003:9) "microsoft windows XP professional kependekan dari Microsoft windows experience professional merupakan sistem operasi berbasis grafis (gambar) dengan berbagai fasilitas, dan kemudahan dalam pengoperasiannya.

Menurut Susanto (2007:167) "o*perating system* (sistem operasi) berfungsi untuk mengendalikan atara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer".

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Beberapa macam sistem operasi, yaitu: Microsoft Windows Me, Mac OS X, Microsoft Windows NT Server, Microsoft Windows Xp, Microsoft Vista, Microsoft Windows 7, dan masih banyak lagi contoh dari sistem operasi.

2.4.2 *Interpreter Software*

Menurut Susanto (2007:171) "*interpreter* merupakan *software* yang berfungsi sebagai penterjemah bahasa yang dimengerti oleh komputer (bahasa mesin) perintah per perintah".

Beberapa contoh *Interpreter*, yaitu: Microsoft access, Oracle, Microsoft Visual Foxpro, Delphi.

A. *Hardware*

Manurut Susanto (2007:139) "*hardware* merupakan paralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan data mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi".

1. Bagian Input (*Input Device*)

   Merupakan peralatan yang dapat digunakan untuk memasukan data ke dalam komputer.

2. Bagian Pengolahan Utama dama Memori

   Merupakan bagian untuk megolah data dan memproses data sehingga menjadi informasi.

3. Bagian *Output* (*Output Device*)

   Merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

B. *Software*

Software menurut Susanto (2007:165) "*software* merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer".

C. *Brainware*

Brainware menurut Susanto (2007:187) "b*rainware* atau sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi (SI) dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai sistem informasi manajemen".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *hardware* adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan data mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. *Software* merupakan perangkat lunak yang teridir dari program yang digunakan untuk menjalankan komputer. Sedangkan *Brainware* merupakan orang atau sumber daya manusia untuk menjalankan sebuah sistem yang mengolah data menjadi informasi.

2.4.3 Compiler Software

Pengertian *compiler* menurut Susanto (2007:173) "*compiler* berfungsi untuk menterjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia kedalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung satu file".

Beberapa contoh *compiler*, yaitu: Delphi, Visual Foxpro, Visual Basic, dan lain-lain.

Menurut Madcoms (2006:1) "visual Basic 6.0 berasal dari bahasa pemrograman BASIC (*Beginners all-purpose Symbolic Intruction Code*)".

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:171) “visual Basic merupakan salah satu *development tool* yaitu alat bantu untuk membuat berbagai macam program komputer, khususnya yang menggunakan sistem operasi Windows”.

Berdasarkan pengertian di atas visual basic 6.0 yang berasal dari bahasa Basic, yang digunakan untuk membuat berbagai macam program komputer terutama yang menggunakan sistem operasi Windows.

2.4.4 *Application Software*

Beberapa *software* aplikasi yang penulis gunakan, yaitu

A. SQL Server

Menurut Darmayuda (2007:7) “microsoft *SQL Server* merupakan salah satu *database relational yang banyak digunakan*. SQL Server dirancang untuk penggunaan aplikasi dengan arsitektur *client/server*.

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:145) “microsoft *SQL Server* 2000 adalah perangkat lunak *relational database management system* (RDBMS) yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas.

Berdasarkan pengertian di atas penulis mendapat kesimpulan, bahwa SQL Server adalah sebuah *database relational* yang didesain untuk melakukan proses manipulasi data berukuran besar dan dirancang untuk penggunaan aplikasi berarsitektur *client/server*.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

B. *Crystal Report*

Kusrini dan Koniyo (2007:264):

> *Crystal report* merupakan program yang dapat digunakan untuk membuat, menganalisa dan menterjemahkan informasi yang terkandung dalam databse atau program ke dalam berbagai jenis laporan yang sangat fleksibel.

Menurut Madcoms (2003:40) "*crystal Report* merupakan program khusus untuk membuat laporan yang terpisah dengan program visual basic 6.0, tetapi keduanya dapat dihubungkan (*linkage*)".

Berdasarkan pengertian di atas, *crystal report* adalah sebuah program yang digunakan untuk membuat laporan yang terkandung dalam sebuah *database* dan terpisah dengan program visual basic 6.0, tetapi dapat dihubungkan.

C. *Client Server*

Pengertian *Client Server* menurut Gallau & Ramanathan (1996) (dalam Amin, 2007:1) "*client-server* adalah *client* mengirim permintaan ke *server*, *Server* menerjemahkan pesan, kemudian berusaha memnuhi permintaan".

Menurut Fathansyah (2002:154) "sistem ini terdiri dari atas dua komponen (mesin) utama, yaitu *Client* dan *Server*. *Client* berisi aplikasi data dan *Server* berisi DBMS dan Basis Data".

Berdasarkan pengertian di atas *client server* adalah sebuah *software* aplikasi yang berjalan dan saling berinteraksi dalam sebuah komputer dan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem tersentralisasi.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com